



MELAMPAUI KESEJAJARAN METAFORIS: PEMBACAAN *PRAMĀNAVĀDA* ATAS KRISIS KESAKSIAN, PERSEPSI, DAN NALAR KRITIS DALAM TEKNO-OTORITARIANISME ALGORITMIK DI INDONESIA

I Komang Suastika Arimbawa^{1,2}

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta¹

Fakultas Brahma Widya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar²

ikomangsuastikaarimbawa@mail.ugm.ac.id¹

ABSTRACT

*The decline of electoral democracy in post-reform Indonesia has been increasingly characterised by algorithmic manipulation of information carried out by networks of cyber-troops, yet the existing literature on digital politics generally stops at political-economic and ethnographic analyses of these networks, without adequately explaining which cognitive mechanisms within citizens are actually being undermined, such that false testimonies and engineered perceptions can be accepted as valid. This article aims to develop an epistemological diagnostic framework to address this gap. Employing the method of comparative philosophical hermeneutics, this article brings together the analysis of *pramāṇa* within the classical Nyāya tradition, which is subsequently expanded through the ethical-soteriological concepts of other Hindu traditions such as Sāṃkhya-Yoga and the Bhagavad Gītā (not claimed to constitute a uniform Hindu epistemological doctrine), with recent empirical-political literature on algorithmic manipulation in Indonesia's digital public sphere. The findings of the study indicate that algorithmic authoritarianism systematically undermines three epistemic instruments, namely śabda *pramāṇa* (authentic testimony), *pratyakṣa* (direct sensory perception), and *viveka* (critical discernment), which are causally rooted in the moral decay of power (*āsuric sampad*), and which collectively produce *bhrānti jñāna* (erroneous belief), which is subsequently institutionalised and continuously reinforced by algorithmic incentives. The contribution of this article is specific, not merely thematic, in that the *āpta* criterion in śabda *pramāṇa* ties epistemic validity to the moral character of the witness (a normative link not found in more formal contemporary analytic theories of testimony), thereby enabling this framework to explain why sponsored disinformation is doubly corrupt: it is both propositionally false and morally illegitimate at the source level. As a practical implication, this article proposes a reconceptualisation of critical civic literacy based on *viveka-khyāti*.*

Keywords: *nyāya; pramāṇavāda; epistemology of testimony; techno-authoritarianism; viveka-khyāti; Indonesian digital democracy.*

ABSTRAK

Kemunduran demokrasi elektoral di Indonesia pasca-reformasi semakin ditandai oleh manipulasi informasi algoritmik yang dijalankan jaringan *cyber-troops*, namun literatur politik-digital yang ada umumnya berhenti pada analisis ekonomi-politik dan etnografis atas jaringan tersebut, tanpa menjelaskan secara memadai instrumen kognitif apa dalam diri warga negara yang sesungguhnya rusak sehingga kesaksian palsu dan persepsi rekayasa dapat diterima sebagai sesuatu yang valid. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka

diagnostik epistemologis atas kekosongan tersebut. Dengan metode kajian pustaka filosofis-komparatif (*comparative philosophical hermeneutics*), artikel ini mempertemukan analisis *pramāṇa* dalam tradisi *Nyāya* klasik, yang kemudian diperluas melalui konsep etisoteriologis dari tradisi Hindu lain seperti *Sāṃkhya-Yoga* dan *Bhagavad Gītā* (bukan diklaim sebagai satu doktrin epistemologi Hindu yang seragam), dengan literatur empiris-politik terkini mengenai manipulasi algoritmik di ruang publik digital Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa otoritarianisme algoritmik merusak tiga instrumen epistemik secara sistemik, yaitu *śabda pramāṇa* (kesaksian otentik), *pratyakṣa* (persepsi indrawi langsung), dan *viveka* (daya pilah kritis), yang secara kausal berakar pada kemerosotan watak kekuasaan (*āsuric sampad*), dan bersama-sama memproduksi *bhrānti jñāna* (keyakinan keliru), yang kemudian dilembagakan dan terus-menerus diperkuat oleh insentif algoritmik. Kontribusi artikel ini bersifat spesifik, bukan sekadar tematik, di mana kriteria *āpta* pada *śabda pramāṇa* mengikat validitas epistemik pada karakter moral pemberi kesaksian (pengikatan normatif yang tidak tersedia dalam teori testimoni analitik kontemporer yang lebih formal), sehingga kerangka ini mampu menjelaskan mengapa disinformasi bersponsor bersifat korup secara ganda, yaitu keliru secara proposisional sekaligus tidak sah secara moral pada level sumbernya. Sebagai implikasi praktis, artikel ini mengajukan rekonseptualisasi literasi kewarganegaraan kritis berbasis *viveka-khyāti*.

Kata Kunci: *nyāya*; *pramāṇavāda*; epistemologi testimoni; tekno-otoritarianisme; *viveka-khyāti*, demokrasi digital Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Transformasi ekosistem digital telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, diprioritaskan, dan dipercaya dalam ruang publik demokratis Indonesia. Dibaca dalam konteks historis-politik pasca-reformasi, transformasi ini menandai metamorfosis ancaman terhadap demokrasi elektoral yang kian senyap namun destruktif. Kemunduran demokrasi (*democratic decline*) tidak lagi dicirikan secara konvensional melalui pembungkaman fisik oleh aparat atau pelarangan institusi politik secara terbuka, melainkan bermutasi ke dalam bentuk perang kognitif (*cognitive warfare*) yang dimediasi ekosistem digital. Kajian etnografis terbaru atas industri *buzzer* di Indonesia menunjukkan bahwa jaringan akun anonim terkoordinasi (yang didanai secara tersembunyi oleh aktor politik dan bekerja melalui pola rekrutmen serta pembagian kerja yang terorganisir) telah menjadi infrastruktur permanen dalam kontestasi opini publik, jauh melampaui sekadar taktik kampanye musiman (Sastramidjaja & Wijayanto, 2022). Tapsell (2017) mencatat bahwa konsolidasi kekuatan modal atas infrastruktur media di Indonesia memungkinkan pembungkaman oposisi secara halus melalui pengalihan isu dan disinformasi terstruktur, tanpa represi terbuka.

Kendati diskursus mengenai politik digital dan pemburukan demokrasi di Indonesia semakin marak, tinjauan atas literatur yang ada menunjukkan keterbatasan konseptual yang mendasar. Studi-studi di atas (betapa pun kaya secara etnografis dan ekonomi-politik) secara sengaja membatasi diri pada pertanyaan siapa mendanai siapa dan bagaimana jaringan ini bekerja, bukan pertanyaan epistemologis yang lebih dalam, yaitu: instrumen kognitif apa dalam diri warga negara yang dirusak sehingga kesaksian palsu dan persepsi yang direkayasa bisa diterima sebagai valid? Kekosongan ini bukan kelalaian peneliti media dan politik, ia adalah batas disipliner yang wajar, karena pertanyaan tentang validitas pengetahuan (*epistemic validity*) memang berada di ranah filsafat, bukan sosiologi media empiris. Artikel ini mengambil jalan yang berbeda dengan mendayagunakan *pramāṇavāda* sebagai pisau analisis yang secara spesifik menyorot kekosongan itu.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan cakupan *pramāṇavāda* yang digunakan dalam artikel ini, mengingat pembahasan tentang *pramāṇa* dalam filsafat India

tidak berada dalam satu doktrin epistemologi yang seragam. *Nyāya*, *Mīmāṃsā*, *Vedānta*, dan epistemologi *Buddhis* memiliki konstruksi berbeda mengenai jumlah, status, dan validitas *pramāṇa*. *Nyāya* klasik mengakui empat *pramāṇa* yang berdiri sendiri dan setara validitasnya (*pratyakṣa*, *anumāna*, *upamāna*, dan *śabda*); *Mīmāṃsā* menambahkan *arthāpatti* dan *anupalabdhi*, serta memberi *śabda* (khususnya wahyu Veda) otoritas *svataḥ prāmāṇya* (validitas-diri) yang tidak dimiliki *Nyāya*; *Advaita Vedānta* menempatkan seluruh *pramāṇa* empiris (*vyavahārika*) di bawah otoritas final *śruti* dalam persoalan realitas tertinggi; sementara epistemologi *Buddhis* (*Dignāga*, *Dharmakīrti*) hanya mengakui dua *pramāṇa* (*pratyakṣa* dan *anumāna*) dan secara eksplisit menolak *śabda* sebagai instrumen independen. Artikel ini secara spesifik bertumpu pada konstruksi *Nyāya* klasik atas *pratyakṣa* dan *śabda pramāṇa*, karena kerangka inilah yang paling langsung relevan bagi persoalan testimoni dan persepsi indrawi yang menjadi fokus artikel, dan kemudian diperluas (bukan disamakan) melalui konsep etis-soteriologis dari *Sāṃkhya-Yoga* (untuk *viveka-khyāti*) dan *Bhagavad Gītā* (untuk *āsurī sampad*). Selanjutnya, kerangka gabungan ini disingkat sebagai “kerangka *pramāṇa*-etis Hindu”, untuk menghindari kesan bahwa artikel ini memperlakukan *Nyāya*, *Sāṃkhya-Yoga*, dan etika *Bhagavad Gītā* sebagai satu sistem doktrinal tunggal.

Pembatasan kedua menyangkut status metafisis kerangka ini, mengingat perbandingan lintas tradisi filsafat rawan pada eklektisisme yang dangkal. Epistemologi *Nyāya* bersifat realis, di mana ia mengandaikan *satya* (kebenaran) sebagai korespondensi objektif yang berdiri independen dari kesepakatan intersubjektif. Sebuah komitmen metafisis yang berbeda dari proyek Jürgen Habermas (1984; 1991), yang membangun rasionalitas komunikatif di atas prosedur konsensus tanpa bersandar pada klaim metafisis tentang kebenaran transenden. Artikel ini tidak menyamakan keduanya. Habermas digunakan secara heuristik-komparatif, yaitu sebagai jembatan konseptual bagi pembaca yang lebih akrab dengan teori kritis Barat, untuk memahami mengapa kolonisasi *lifeworld* oleh rasionalitas instrumental adalah persoalan yang, dari sudut pandang berbeda, juga dikenali oleh kerangka *pramāṇa*-etis Hindu. Namun klaim filosofis substantif artikel ini, bahwa otoritarianisme algoritmik (*algorithmic authoritarianism*), yakni pola dominasi kekuasaan yang (tanpa represi terbuka) memanfaatkan arsitektur algoritmik platform digital (kurasi otomatis, personalisasi linimasa, dan produksi konten sintetik massal) untuk secara sistematis mendistorsi instrumen epistemik warga negara demi mempertahankan kontrol politik, merusak akses pada kebenaran objektif. Ini berdiri di atas komitmen realis *Nyāya* sendiri, bukan di atas proseduralisme Habermasian.

Berdasarkan kerangka ini, artikel ini mengajukan tesis bahwa otoritarianisme algoritmik di Indonesia merusak tatanan kebenaran bukan melalui satu titik kegagalan tunggal, melainkan melalui kerusakan berlapis pada tiga instrumen epistemik, yaitu: kesaksian (*śabda pramāṇa*), persepsi (*pratyakṣa*), dan daya pilah kritis (*viveka*), yang masing-masing berakar pada kemerosotan watak kekuasaan (*āsurī sampad*), sehingga penyelamatan demokrasi memerlukan kebangkitan nalar etis-epistemik, bukan sekadar regulasi hukum positif. Bagian 2.1 menganalisis kerusakan *śabda pramāṇa* dan *pratyakṣa* pada level instrumen epistemik itu sendiri; bagian 2.2 menjelaskan mengapa kerusakan itu berakar pada watak kekuasaan *āsurī*, bukan sekadar berjalan paralel dengannya; dan bagian 2.3 mengajukan *viveka-khyāti* sebagai basis resistensi, dengan pengakuan eksplisit atas pergeseran makna yang terjadi dalam ekstensi konsep ini.

II. PEMBAHASAN

2.1 Arsitektur Epistemik *Techno-Authoritarianism*

A. Distorsi *Śabda Pramāṇa*: Krisis Otoritas Testimonial dalam Ekosistem Algoritmik

Dalam epistemologi *Nyāya*, *śabda pramāṇa* (kesaksian verbal yang otentik)

merujuk pada pernyataan yang valid karena bersumber dari *āpta*, otoritas yang teruji kejujurannya (*satya*), memiliki kualifikasi keilmuan, serta bebas dari tendensi subjektif yang menyesatkan (Radhakrishnan, 1999). Untuk memahami secara presisi bagaimana industri *cyber-troops* merusak *śabda pramāṇa*, perlu dibedakan tiga tingkat kegagalan epistemik yang lazim dicampuradukkan dalam kajian populer. Pertama, kegagalan pada instrumen (*pramāṇa* itu sendiri, apakah saluran kesaksian secara teknis bisa diverifikasi); Kedua, kegagalan pada objek yang disaksikan (*prameya*, apakah proposisi yang disampaikan sesuai fakta); dan Ketiga, kegagalan pada subjek penerima (*pramata*, apakah warga negara memiliki kapasitas kritis untuk menilai kesaksian yang diterimanya). Filsuf analitik Coady (1994) dalam kajian kanoniknya tentang epistemologi testimoni, menunjukkan bahwa kepercayaan rasional terhadap kesaksian orang lain bersandar pada asumsi latar belakang bahwa mayoritas penutur pada umumnya jujur dan kompeten. Ini adalah sebuah asumsi regulatif yang oleh Coady disebut sebagai prasyarat tidak terelakkan bagi ekonomi pengetahuan manusia.

Industri *buzzer* di Indonesia menyerang ketiga tingkat ini sekaligus, namun dengan titik tumpu utama pada tingkat *pramāṇa*: alih-alih bersumber dari *āpta*, informasi diproduksi oleh jaringan akun anonim terkoordinasi yang secara sengaja menyamarkan identitas dan sumber pendanaannya, sebuah pola operasional yang didokumentasikan secara etnografis oleh Sastramidjaja & Wijayanto (2022) sebagai ciri pembeda *cyber-troops* dari bentuk partisipasi politik daring lainnya, di mana pendanaan yang disembunyikan, koordinasi yang rapi, dan penggunaan akun anonim secara masif. Ini bukan sekadar kesaksian yang keliru secara isi (kegagalan *prameya*), melainkan kesaksian yang, secara struktural, tidak pernah memenuhi syarat sebagai *śabda pramāṇa* sejak awal karena sumbernya secara sengaja dirancang untuk tidak dapat diverifikasi sebagai *āpta* atau non-*āpta*. Dalam kerangka Coady, ini adalah serangan terhadap prasyarat regulatif itu sendiri, bukan penyalahgunaan kepercayaan pada testimoni, melainkan penghancuran kondisi yang memungkinkan kepercayaan itu rasional. Flood (2002) dalam kajiannya tentang mitos politik, mencatat bahwa narasi politik yang efektif tidak harus benar secara faktual, melainkan cukup memuaskan kebutuhan psikologis dan ideologis audiensnya. Ini merupakan sebuah mekanisme yang menjelaskan mengapa kesaksian artifisial dari *buzzer* tetap dapat diterima meski sumbernya tidak terverifikasi, di mana ia tidak dinilai berdasarkan kredensial *āpta*, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan narasi yang sudah diinginkan penerima.

Pada saat yang sama, kegagalan pada tingkat *pramata* turut berperan, di mana ketika kesaksian palsu dilembagakan melalui algoritma pencarian dan linimasa media sosial, masyarakat mengalami apa yang dalam epistemologi Hindu penulis sebut dengan istilah *bhrānti jñāna* (pengetahuan yang keliru secara struktural), bukan sekadar ketidaktahuan pasif, melainkan keyakinan aktif yang secara sistematis salah karena kondisi penerimaannya sudah dirusak lebih dulu. Zuboff (2019) menyebut mekanisme ini sebagai bagian dari *surveillance capitalism*, di mana pasar digital tidak hanya mengekstraksi perilaku manusia, tetapi juga memodifikasi kognisi massa demi akumulasi modal dan kontrol politik.

B. Distorsi *Pratyakṣa* dari Ilusi Indrawi ke Ambruknya “Backstop” Epistemik

Selain kesaksian verbal, otoritarianisme digital menyerang instrumen epistemik paling mendasar dalam pengalaman manusia, yaitu *pratyakṣa* (persepsi indrawi langsung). Dalam tradisi *nyāya* klasik, sebagaimana direkonstruksi secara analitik oleh Matilal (1986), *pratyakṣa* dipahami sebagai kontak langsung yang tidak termediasi antara indra dan objek eksternal. Ini menjadi sebuah bentuk realisme naif (*direct*

realism) yang mengandaikan keandalan medium pengamatan sebagai prasyarat kepastian kebenaran. Keandalan itulah yang justru diserang oleh teknologi manipulasi visual mutakhir, melahirkan apa yang oleh tradisi ini dapat disebut *pratyakṣābhāsa*, penampakan indrawi yang menipu, di mana rekaman visual yang tampak langsung ternyata adalah rekayasa artifisial.

Rini (2020) dalam kajian analitiknya tentang *deepfake*, menawarkan konsep yang secara mengejutkan paralel dengan kekhawatiran *nyāya* klasik, di mana ia berargumen bahwa rekaman audio-visual selama ini berfungsi sebagai *epistemic backstop* bagi praktik testimoni kita, yakni: kepercayaan rasional kita pada kesaksian orang lain bergantung pada kemungkinan rekaman independen mengoreksi kesaksian yang keliru. Ketika *deepfake* mengikis nilai epistemik rekaman itu sendiri, kata Rini, kita menghadapi ancaman berlapis dua, bukan hanya rekaman individual yang tidak lagi bisa dipercaya, melainkan seluruh sistem testimoni sosial yang selama ini bersandar pada kemungkinan verifikasi visual juga ikut runtuh. Paralel ini menegaskan (dari dua tradisi filsafat yang berjarak lebih dari dua milenium) bahwa persoalan mendasarnya bukan sekadar teknis (mendeteksi video palsu), melainkan struktural, di mana hilangnya jangkar (*backstop* dalam istilah Rini, keandalan medium dalam istilah *nyāya*) yang selama ini menjaga hubungan antara indra dan realitas.

Dalam konteks politik digital Indonesia, distorsi *pratyakṣa* termanifestasi melalui penyuntingan video selektif (*framing*) dan rekayasa tren linimasa yang didorong algoritma retorika kebencian. Kondisi ini menemukan resonansi dengan konsep hiperrealitas Baudrillard (1994), di mana simulasi telah menggantikan realitas objektif, namun perbandingan dengan Rini dan Matilal di atas menunjukkan bahwa klaim ini tidak perlu berhenti pada level metafora budaya (“realitas semu”), melainkan dapat dirumuskan sebagai klaim epistemologis yang presisi, di mana warga negara kehilangan akses pada kriteria pembeda yang secara struktural pernah tersedia bagi *pratyakṣa* yang veridikal.

2.2 Dari Krisis Epistemik ke Kemerosotan Moral: *Āsurī Sampad* sebagai Penjelasan Kausal

A. Mengapa Kerusakan Epistemik Berakar pada Watak *Āsurī*, bukan Sekadar Berjalan Paralel?

Krisis epistemologis yang diuraikan pada sub 2.1 bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada kemerosotan watak para pemegang kekuasaan. Penting untuk ditegaskan hubungan kausalnya, bukan sekadar tematiknya, di mana dalam *Bhagavadgītā* XVI (Pudja, 1999) disebutkan bahwa watak *āsurī* tidak digambarkan sebagai kejahatan moral yang terpisah dari kebutaan epistemik, melainkan sebagai kondisi di mana subjek tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, yaitu sebuah bentuk *avidyā* (ketidaktahuan) yang secara struktural menjadi prasyarat sekaligus akibat dari orientasi destruktif itu sendiri. Klaim bahwa karakter moral dan kapasitas epistemik tidak dapat dipisahkan ini bukan sekadar tafsir teologis yang eksotis dari sudut pandang filsafat analitik kontemporer. Zagzebski (1996) dalam proyeknya membangun epistemologi kebajikan (*virtue epistemology*), berargumen secara struktural sejalan, bahwa keandalan suatu keyakinan tidak dapat dievaluasi semata dari kesesuaiannya dengan fakta, melainkan juga dari kebajikan intelektual (*intellectual virtue*) (seperti kerendahan hati intelektual dan keterbukaan pikiran) yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh subjek yang meyakinkannya. Pertemuan ini menegaskan bahwa pemisahan tegas antara ranah etika dan ranah epistemologi yang lazim dalam kajian populer sesungguhnya adalah pemisahan yang keliru secara filosofis di kedua tradisi, di mana watak buruk bukan sekadar konsekuensi dari (melainkan juga penyebab bagi) kegagalan mengenali

kebenaran.

Dengan kata lain, watak *āsurī* dan kebutaan epistemik saling mengonstitusi, di mana kekuasaan yang berorientasi pada keserakahan dan kecongkakan secara aktif memproduksi distorsi kesaksian dan persepsi sebagai instrumen untuk mempertahankan dirinya, sementara distorsi itu pada gilirannya semakin menumpulkan kapasitas evaluatif kekuasaan tersebut atas konsekuensi moral tindakannya sendiri. Dalam kerangka Zagzebski, *dambha* (kecongkakan) dapat dibaca sebagai padanan struktural dari apa yang disebutnya sebagai *epistemic vice*, yaitu watak tertutup dan enggan dikoreksi yang secara sistematis menghalangi subjek dari kemungkinan mengenali kekeliruannya sendiri. Kekuasaan yang telah tenggelam dalam *dambha* tidak lagi memiliki mekanisme internal untuk mempertanyakan legitimasi tindakannya, sehingga distorsi epistemik yang ia produksi ke luar (melalui *cyber-troops* dan manipulasi persepsi) sesungguhnya adalah cerminan dari kebutaan yang telah lebih dulu terjadi di dalam. Inilah yang menjelaskan mengapa arsitektur epistemik *techno-authoritarianism* (2.1) dan degradasi moral kekuasaan (2.2) bukan dua tema yang kebetulan berdekatan, melainkan satu lingkaran sebab-akibat yang saling memperkuat.

Pengerahan jaringan *cyber-troops*, pendanaan akun anonim untuk menebar fitnah, dan manipulasi informasi guna membungkam kritik akademis merupakan manifestasi modern dari politik penipuan (*dambha*) yang mereduksi warga negara (yang semestinya diperlakukan sebagai subjek bermartabat berkesadaran bebas) menjadi sekadar instrumen elektoral atau objek pasif manipulasi. Reduksi ini dapat dirumuskan secara lebih presisi melalui rumusan kemanusiaan (*formula of humanity*) Immanuel Kant (1997), yang menegaskan bahwa memperlakukan manusia semata-mata sebagai sarana (*merely as means*) bagi tujuan pihak lain (alih-alih juga sebagai tujuan pada dirinya sendiri / *end in itself*) adalah pelanggaran moral yang paling mendasar, karena ia mengingkari status manusia sebagai makhluk rasional yang berhak menentukan dan menilai sendiri klaim kebenaran yang diterimanya. Ketika warga negara direduksi menjadi target algoritmik yang emosinya dapat dipicu dan suaranya dapat direkayasa tanpa sepengetahuannya, pelanggaran yang terjadi bukan sekadar pelanggaran privasi data, melainkan pelanggaran atas martabat epistemik warga negara sebagai subjek yang berhak bernalar. Horkheimer & Adorno (2002), dalam *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, menunjukkan tesis yang secara struktural sejalan dengan diagnosis ini, di mana rasionalitas modern dan teknologi, alih-alih membebaskan manusia, justru dapat tereduksi menjadi alat indoktrinasi massal melalui industri budaya dan informasi. Ini adalah sebuah proses yang mereka sebut sebagai pembalikan dialektis pencerahan menjadi mitos baru yang justru semakin mengukuhkan dominasi.

Sintesis dari ketiga rujukan lintas tradisi ini (*Bhagavadgītā*, epistemologi kebajikan Zagzebski, dan etika deontologis Kant) menunjukkan bahwa diagnosis artikel ini bukan sekadar analogi tematik yang kebetulan, melainkan konvergensi argumentatif dari titik tolak filosofis yang berbeda menuju satu simpulan yang sama, yaitu kekuasaan yang telah kehilangan kebajikan moralnya niscaya juga kehilangan kapasitas epistemiknya untuk mengenali kebenaran, dan sebaliknya, kekuasaan yang secara sistematis merusak kapasitas epistemik warganya niscaya juga tengah kehilangan pijakan moralnya sendiri. Lingkaran sebab-akibat inilah yang menjelaskan mengapa penyelamatan demokrasi digital, sebagaimana akan diargumentasikan lebih lanjut pada 2.3, tidak dapat direduksi menjadi persoalan regulasi teknis *platform* semata, melainkan menuntut kebangkitan nalar etis-epistemik yang menyasar akar ganda persoalan ini sekaligus.

B. Erosi Keteraturan Sosial: *Anṛta* dan Disintegrasi Ruang Publik

Ketika politik manipulatif berwatak *āsurī* dilembagakan melalui algoritma, kerusakannya melampaui batas elektoral dan merasuk ke jantung tatanan sosial itu sendiri. Polarisasi digital yang dipelihara melalui algoritma pembenci (*rage-baiting* dan *echo chambers*) bukan sekadar efek samping teknis dari desain *platform*, melainkan mekanisme struktural yang secara sistemik mengoyak ikatan solidaritas yang dilandasi kejujuran (*satya*). Sunstein (2017) dalam analisisnya tentang fragmentasi demokrasi di era media sosial, menunjukkan bahwa algoritma personalisasi menciptakan apa yang disebutnya “*daily me*”, sebuah realitas informasi yang dikurasi secara individual sedemikian rupa sehingga warga negara semakin jarang mengalami perjumpaan tak terduga dengan gagasan, fakta, atau sesama warga yang berbeda pandangan. Dalam kerangka filsafat Hindu, proses ini dapat dibaca sebagai pelembagaan struktural atas *avidyā* kolektif, bukan sekadar ketidaktahuan individual yang bisa diperbaiki melalui edukasi, melainkan arsitektur informasi yang secara aktif mereproduksi ketidaktahuan sebagai kondisi permanen, karena setiap interaksi di dalamnya justru memperkuat, bukan menguji, keyakinan yang sudah dipegang sebelumnya. Solidaritas sosial yang mensyaratkan pengakuan intersubjektif atas kebenaran bersama (*satya* sebagai pondasi *dharma* sosial) dengan demikian tidak lagi terkikis dari luar, melainkan dari dalam struktur epistemik warga negara sendiri.

Konsekuensi paling mengkhawatirkan dari proses ini adalah normalisasi kebohongan sebagai instrumen politik yang sah. Kebohongan dan pembunuhan karakter yang diproduksi secara massal tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral yang memerlukan pertanggungjawaban, melainkan dinormalisasi sebagai “strategi komunikasi politik” belaka, sebuah pergeseran bahasa yang sebagaimana diperingatkan Arendt (1972) dalam esainya tentang kebohongan politik, jauh lebih berbahaya daripada kebohongan itu sendiri. Arendt menunjukkan bahwa kebohongan yang terorganisir dan berkelanjutan tidak serta-merta membuat orang mempercayai kebohongan tersebut, melainkan menghancurkan kapasitas kolektif untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan sama sekali. Ini merupakan sebuah kondisi yang ia sebut sebagai musnahnya “realitas dunia bersama” (*the reality of the common world*). Fenomena ini menemukan resonansi dengan peringatan Habermas (1991) tentang keruntuhan fungsi komunikatif ruang publik ketika dikuasai kepentingan ekonomi dan manipulasi strategis (*strategic action*), yang menggantikan tindakan komunikatif berorientasi kesepahaman dengan tindakan instrumental berorientasi hasil semata. Namun dalam kerangka filsafat Hindu, disintegrasi ruang publik komunikatif ini memiliki makna kosmologis yang lebih radikal daripada sekadar kegagalan fungsi sosial, ia adalah wujud nyata dari dominasi *anṛta* (ketidakbenaran, kekacauan, penyimpangan dari tatanan) atas *rta* (tatanan kosmis-moral yang menjaga keselarasan alam semesta dan kehidupan manusia). Ketika *anṛta* menguasai wacana publik, yang terancam bukan hanya stabilitas politik jangka pendek, melainkan keselarasan batiniah dan sosial secara menyeluruh, sebab dalam kosmologi ini, kekacauan pada tatanan ucapan dan kesaksian publik pada akhirnya berimplikasi pada kekacauan tatanan kehidupan itu sendiri.

2.3 Menuju Pemulihan Kedaulatan Kognitif melalui *Viveka-khyāti* sebagai Perluasan Argumentatif yang Disengaja

A. Menjustifikasi Perluasan Makna dari Diskriminasi Metafisik ke Diskriminasi Sosial-Epistemik

Dalam tradisi *sāṃkhya* dan *yoga*, *viveka-khyāti* secara ketat merujuk pada kesadaran diskriminatif yang membebaskan, kemampuan memilah antara *puruṣa* (kesadaran murni) dan *prakṛti* (materi), sebagai puncak pembebasan soteriologis dari cengkeraman *māyā* (Larson & Bhattacharya, 1987). Menggunakan istilah teknis ini

untuk menyebut “kemampuan mendeteksi hoaks”, sebagaimana lazim dilakukan literatur literasi digital populer, adalah ekstensi metaforis yang signifikan dan perlu dipertanggungjawabkan secara eksplisit, bukan diperlakukan sebagai penerapan literal. Larson & Bhattacharya (1987) sendiri mencatat bahwa struktur dasar *viveka* dalam *sāmkhya*, sebagai kapasitas membedakan *sat* (yang esensial, nyata) dari *asat* (yang ilusi, artifisial), bersifat generik secara struktural, di mana ia adalah pola kognitif pembedaan yang, dalam konteks soteriologis, diterapkan pada pertanyaan metafisis tentang hakikat diri, namun secara struktural analog dapat diterapkan pada domain epistemik lain di mana yang esensial-otentik harus dibedakan dari yang artifisial-rekaan.

Ekstensi yang diajukan artikel ini karenanya bukan klaim bahwa mendeteksi disinformasi digital sama dengan pembebasan soteriologis, melainkan bahwa keduanya berbagi struktur kognitif dasar yang sama, di mana kapasitas menolak diidentifikasi dengan (atau tertipu oleh) apa yang tampak namun bukan esensial. Dengan pengakuan eksplisit atas pergeseran register ini (dari metafisika pembebasan ke etika-politik ruang publik), *viveka-khyāti* dapat digunakan secara bertanggung jawab sebagai pondasi bagi *civic agency* kontemporer, sejalan dengan gagasan kesadaran kritis (*conscientização*) Freire (2000), di mana pengenalan struktur penindasan adalah prasyarat mutlak bagi pembebasan tertindas.

B. Rekonstruksi Ruang Publik berbasis *Satya*

Revitalisasi kognitif individual (sekuat apa pun ia membangun ketahanan personal terhadap manipulasi informasi) tidak akan berdampak sosial-politik apabila berhenti pada level kesadaran perseorangan tanpa ditransformasikan ke dalam tata kelola ruang publik yang lebih sehat. Ini adalah pembeda penting yang perlu ditegaskan, di mana kebangkitan *viveka* pada level individu adalah kondisi perlu (*necessary condition*), tetapi bukan kondisi cukup (*sufficient condition*), bagi pemulihan demokrasi deliberatif. Perlawanan terhadap otoritarianisme algoritmik karenanya menuntut perumusan ulang literasi digital kritis yang melampaui kecakapan teknis semata (seperti kemampuan mengenali metadata gambar atau memverifikasi sumber tautan) dan diletakkan sebagai latihan spiritual-intelektual yang membangun ketahanan mental terhadap manipulasi informasi secara struktural, bukan sekadar reaksi kasus per kasus terhadap hoaks individual. Latihan semacam ini sejalan dengan gagasan kesadaran kritis Freire, yang menegaskan bahwa pembebasan sejati mengandaikan pengenalan struktur penindasan itu sendiri, bukan sekadar penanganan gejalanya satu per satu.

Pondasi filosofis bagi latihan ini berakar pada prinsip *satya* (kebenaran dan kejujuran mutlak), yang dalam etika publik Hindu bukan sekadar kebajikan personal, melainkan pilar penegakan keadilan sosial (*dharma*) itu sendiri, sebab tanpa kesaksian yang jujur dan persepsi yang tidak terdistorsi, keadilan tidak memiliki basis epistemik untuk ditegakkan. Titik ini menemukan resonansi produktif dengan pembedaan yang diajukan Sen (2009), antara *nīti* dan *nyāya* dalam tradisi hukum dan filsafat politik Hindu. *Nīti* merujuk pada kesesuaian formal-institusional dengan aturan dan prosedur, sedangkan *nyāya* merujuk pada keadilan yang benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Ini merupakan sebuah realisasi yang menurut Sen, tidak dapat dijamin oleh kepatuhan prosedural belaka. Pembedaan ini secara langsung relevan bagi kritik artikel ini atas regulasi hukum positif semata sebagai solusi krisis epistemik demokrasi digital, di mana undang-undang anti-disinformasi atau regulasi *platform* digital, sekuat apa pun dirancang secara *nīti* (formal-prosedural), tidak akan menghasilkan *nyāya* (keadilan yang terwujud secara substantif) apabila warga negara yang menjalankannya tidak memiliki kapasitas *viveka* dan komitmen *satya* yang menopang institusi tersebut dari dalam.

Transformasi dari kesadaran individual menuju tata kelola ruang publik ini menemukan titik temu heuristik (bukan identitas metafisis, sebagaimana telah ditegaskan pada bagian 1) dengan etika wacana kritis Habermas (1984), yang menekankan pentingnya ideal *speech situation*. Sebuah kondisi ruang publik yang bebas dominasi, di mana setiap peserta memiliki kesempatan setara untuk mengajukan, mempertanyakan, dan mempertanggungjawabkan klaim kebenaran tanpa tekanan kekuasaan atau kepentingan tersembunyi. Titik temu ini bersifat struktural, bukan doktrinal. Baik *satya* dalam kerangka Hindu maupun ideal *speech situation* dalam kerangka Habermas sama-sama mensyaratkan bahwa validitas suatu klaim publik harus dapat diuji secara terbuka, bukan diterima semata karena kekuatan pengaruh algoritmik atau kekuasaan politik yang menopangnya. Namun keduanya berangkat dari pondasi filosofis yang berbeda, di mana Habermas dari proseduralisme rasional-komunikatif, Hindu dari komitmen realis-metafisis pada kebenaran objektif sebagai bagian dari tatanan kosmis (*ṛta*). Justru karena perbedaan pondasi inilah pertemuan keduanya menjadi berharga secara argumentatif: alih-alih menyimpulkan bahwa demokrasi tidak dapat bertahan tanpa kebenaran secara mutlak dan universal, konvergensi lintas tradisi ini menunjukkan secara lebih terukur bahwa demokrasi deliberatif memerlukan kondisi epistemik yang memungkinkan klaim publik diuji, dipertanggungjawabkan, dan dibedakan dari manipulasi.

III. SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa otoritarianisme algoritmik di Indonesia merupakan patologi epistemik berlapis, bukan sekadar pelanggaran prosedural elektoral. Pemanfaatan jaringan *cyber-troops* yang secara struktural dirancang untuk tidak dapat diverifikasi sebagai *āpta* bekerja beriringan dengan erosi *backstop* persepsi visual, dan keduanya berakar pada (bukan sekadar berjalan sejajar dengan) kemerosotan watak *āsuri* para pemegang kekuasaan, yang pada akhirnya melumpuhkan *viveka* warga negara.

Kontribusi utama studi ini dapat dirumuskan secara spesifik, bukan sekadar sebagai klaim relevansi tematik, di mana *pramāṇavāda*, melalui kriteria *āpta* pada *śabda pramāṇa*, mengikat validitas epistemik suatu kesaksian pada karakter moral penyampainya secara inheren. Ini merupakan sebuah pengikatan yang berbeda dari epistemologi testimoni analitik kontemporer, yang cenderung memperlakukan keandalan penutur sebagai variabel empiris terpisah dari status proposisi yang disampaikan. Pengikatan normatif inilah yang memberi *pramāṇavāda* daya jelas lebih tajam untuk mendiagnosis mengapa disinformasi bersponsor *buzzer* bersifat korup secara ganda, keliru secara proposisional (kegagalan *prameya*) sekaligus tidak sah secara moral pada sumbernya (kegagalan status *āpta*), sebuah diagnosis yang melampaui apa yang secara analitik-formal saja dapat disediakan oleh teori testimoni Barat konvensional, meski kedua tradisi bertemu secara produktif ketika disandingkan (bandingkan dengan argumen Rini tentang runtuhnya *backstop* testimoni akibat *deepfake*).

Dengan menempatkan pemulihan kognitif melalui *viveka-khyāti* (yang perluasan maknanya dari konteks soteriologis *sāṃkhya* telah dipertanggungjawabkan secara eksplisit pada sub 2.3.A) dan integritas *satya* sebagai poros perlawanan, studi ini menawarkan kerangka diagnostik yang lebih presisi ketimbang analogi tematik semata. Sebagai implikasi, arah riset lanjutan diperlukan untuk menguji secara empiris, misalnya melalui studi etnografis lanjutan yang mengikuti metode Sastramidjaja & Wijayanto, apakah pembedaan tiga tingkat kegagalan epistemik (*pramana*, *prameya*, *pramata*) yang diajukan di sini benar-benar membantu merancang kurikulum literasi digital kritis yang lebih tajam ketimbang model literasi teknis konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, H. (1972). *Crises of the Republic*. New York: Harvest Book.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation*. United States of America: The University of Michigan Press.
- Coady, C. A. J. (1994). *Testimony: A Philosophical Study*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <https://archive.org/details/testimonyphiloso0000coad/page/n7/mode/2up>
- Flood, C. G. (2002). *Political Myth: A Theoretical Introduction*. London and New York: Routledge.
- Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed: 30Th Anniversary Edition. In M. B. R. (Trans.) (Ed.), *Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy*. New York: Continuum Publishing.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society* (Vol. I). Boston: Beacon Press.
- Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. In *an Inquiry Into a Category of Bourgeois Society* (Vol. 68). Cambridge: The MIT Press.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*. California: Stanford University Press.
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. UK: Cambridge University Press.
- Larson, G. J., & Bhattacharya, R. S. (1987). *Encyclopedia of Indian Philosophies: Samkhya A Dualist Tradition in Indian Philosophy*. Princeton: Princeton University Press.
- Matilal, B. K. (1986). *Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge*. Oxford: Clarendon Press.
- Pudja, G. (1999). *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Surabaya: Paramita.
- Rini, R. (2020). Deepfakes and the epistemic backstop. *Philosophers Imprint*, 20(24), 1–16. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2027/spo.3521354.0020.024>
- Sastramidjaja, Y., & Wijayanto. (2022). *Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-Optation of Indonesia's Cybersphere* (Trends in). Singapore: ISEAS Publishing.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: The Belknap Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. UK: Princeton University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London and New York: Rowman & Littlefield International Ltd.
- Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge*. New York: Cambridge University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs. Retrieved from [@Public_Affairs](http://www.publicaffairsbooks.com)